

**PENGARUH KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN  
TERHADAP REALISASI BELANJA APBD  
DPRD KABUPATEN BOJONEGORO**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Ilham Hafizh Priambodo**

**Nim : 31402300203**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Hafizh Priambodo

NIM : 31402300203

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran Terhadap Realisasi Belanja APBD DPRD Kabupaten Bojonegoro”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan,



Ilham Hafizh Priambodo

NIM. 31402300208

# SKRIPSI

## PENGARUH KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP REALISASI BELANJA APBD DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

**Disusun Oleh :**

**Ilham Hafizh Priambodo**

**Nim : 31402300203**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 2025

Pembimbing,



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211302010

# PENGARUH KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP REALISASI BELANJA APBD DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :

*Ilham Hafizh Priambodo*

Nim : 31402300203

Telah dipertahankan di depan reviewer

Pada tanggal 2025

## Susunan Dewan Reviewer

Pembimbing,



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIK. 211302010

Penguji 1,



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt.  
NIK. 211406020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Akuntansi Tanggal 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wujayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.  
NIK 211403012

# KATA PENGANTAR



## ABSTRACT

*Regional financial management is a crucial factor in supporting the success of development and public service delivery at the local level. This article discusses the realities of regional financial management practices in Indonesia, referencing the applicable regulations as well as the various challenges faced by local governments. Using a descriptive-qualitative approach, this study finds that the main issues in regional financial management include weak budget planning, low capacity of government personnel, inappropriate allocation of regional budgets (APBD), and limited utilization of information technology. This article recommends the need to improve human resource capacity, implement bureaucratic reforms, and establish stricter oversight systems.*

**Keywords:** *regional finance, regional budget (APBD), budget management, budget realization, planning.*

## ABSTRAK

*Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor krusial dalam menunjang keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Artikel ini membahas realitas yang terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, mengacu pada regulasi yang berlaku serta berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan anggaran yang lemah, rendahnya kapasitas aparatur, ketidaktepatan alokasi APBD, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat.*

**Kata kunci:** *keuangan daerah, APBD, pengelolaan anggaran, realisasi anggaran, perencanaan*

## DAFTAR ISI

<b>PENGARUH KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP REALISASI BELANJA APBD DPRD KABUPATEN BOJONEGORO .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
<b>BAB 2 .....</b>	<b>9</b>
2.1 LANDASAN TEORI.....	9
2.1.1 Teori Keagenan.....	9
2.1.2 Anggaran .....	11
2.1.3 Penyerapan Anggaran.....	12
2.1.4 Perencanaan Anggaran .....	13
2.2 PENELITIAN TERDAHULU .....	15
2.3 KERANGKA KONSEPTUAL .....	21
<b>BAB 3 .....</b>	<b>23</b>
3.1 JENIS PENELITIAN .....	23

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	23
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA .....	24
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	24
3.5 DEFINISI VARIABEL INDIKATOR.....	25
3.6 TEKNIK ANALISIS DATA.....	26
3.6.2 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	27
3.6.3 Uji Validitas.....	27
3.6.4 Uji Reliabilitas .....	31
3.6.5 Uji Hipotesis.....	32
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R-Square).....	34
<b>BAB 4</b> .....	35
4.1 HASIL PENELITIAN.....	35
4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	36
4.1.3 Uji Hipotesis .....	40
4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R-Square).....	42
4.2 PEMBAHASAN .....	43
<b>BAB V</b> .....	46
5.1 KESIMPULAN .....	46
5.2 IMPLIKASI.....	47
5.2.1 Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya .....	47
5.2.2 Implikasi bagi Pemerintah Daerah .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b> .....	51

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Keuangan daerah adalah bagian penting dari pengelolaan pemerintahan lokal karena secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai program pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, dan mengurangi tingkat kemiskinan jika keuangan mereka dikelola dengan baik. Di sisi lain, keuangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merinci berbagai aspek pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah, termasuk prinsip, struktur organisasi, dan keseluruhan proses pengelolaan anggaran daerah dari awal hingga akhir. Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran, undang-undang ini menetapkan standar yang jelas untuk pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Diharapkan melalui PP ini, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara mandiri namun tetap sesuai dengan standar nasional, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan dan

pelaporan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, peraturan ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab kepala daerah, DPRD, dan pejabat terkait lainnya dalam menjamin bahwa pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. APBD menunjukkan perkiraan pendapatan dan bagaimana pengeluaran akan dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah adalah beberapa komponen utama APBD, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. APBD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh setiap unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dianggarkan dalam APBD. DPA berisi rincian anggaran dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan. Setelah APBD disahkan, DPA membantu SKPD menyusun laporan penggunaan anggaran yang akurat dan transparan. DPA mencakup alokasi anggaran per kegiatan,

informasi tentang sumber pendanaan, dan metrik yang akan dicapai selama pelaksanaan kegiatan.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), salah satu faktor yang memengaruhi realisasi belanja adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang baik memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana dengan lebih efisien dan menetapkan prioritas program. Proses ini mencakup menemukan kebutuhan, menghitung biaya, dan membuat jadwal pelaksanaan yang realistis untuk mengurangi risiko penundaan atau perubahan yang tidak diinginkan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi dana yang telah ditetapkan atau kesalahan estimasi biaya adalah masalah yang dapat muncul dalam pelaksanaan jika perencanaan anggaran tidak dilakukan dengan baik. Karena setiap perubahan rencana biasanya memerlukan revisi administratif, yang memerlukan waktu dan sumber daya tambahan, hal ini dapat mengganggu penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang teliti dan detail pada tahap awal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa realisasi belanja pada DPA dapat tercapai sesuai target waktu dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, banyak program daerah tidak direncanakan dengan baik, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan seringkali mengubah atau merevisi rencana. Kegagalan perencanaan ini dapat disebabkan oleh kurangnya analisis menyeluruh terhadap kebutuhan lokal, kekurangan data yang akurat, atau ketidaktepatan dalam menentukan prioritas program. Karena itu,

proyek yang telah dianggarkan sering tertunda di tahap awal, seperti persiapan administrasi dan perizinan, yang seharusnya selesai sebelum pelaksanaan dimulai. Selain itu, perubahan-perubahan dalam rencana pelaksanaan program seringkali memerlukan penyesuaian anggaran secara bertahap, yang menyebabkan proses pengucuran dana menjadi lebih lama. Faktor ini tidak hanya menurunkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga berdampak pada seberapa efektif dan efisien program dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegagalan dalam mencapai target penyerapan anggaran dapat menyebabkan hilangnya manfaat dari belanja yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena tidak seluruh dana yang dialokasikan dapat digunakan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan dana menganggur (*idle money*). Jika pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, keterbatasan dana yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai kegiatan strategis pemerintah. Penyerapan anggaran dan pemanfaatan belanja diarahkan pada kegiatan yang langsung berdampak pada kepentingan masyarakat luas, seperti pendanaan berbagai layanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, penyuluhan kesehatan, perbaikan jalan, dan lain-lain.

Aparatur daerah seringkali tidak memahami regulasi keuangan dan akuntansi, yang menyebabkan penyerapan anggaran yang buruk. Karena aparatur tidak memahami sepenuhnya prosedur penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, administrasi anggaran menjadi lebih lambat. Selain itu, kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan aparatur daerah ragu-ragu saat

membuat keputusan anggaran, yang dapat menghambat pelaksanaan program dan pengeluaran dana yang diperlukan. Selain itu, kesalahan administratif, revisi dokumen, dan pengajuan ulang dapat menghambat proses pencairan dana karena ketidakmampuan aparatur untuk mengelola anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya. Akibatnya, anggaran diserap dengan buruk dan tujuan pembangunan daerah terhambat.

*Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>72.914.500.580</b>	<b>60.400.991.859,00</b>	<b>82,84</b>
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>68.343.193.249</b>	<b>56.292.896.519,00</b>	<b>82,37</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	32.179.350.482	30.299.403.264,00	94,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.163.842.767	25.993.493.255,00	71,88
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>68.343.193.249</b>	<b>56.292.896.519,00</b>	<b>82,37</b>
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.571.307.331</b>	<b>4.108.095.340,00</b>	<b>89,87</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.504.707.331	4.059.255.340,00	90,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.600.000	48.840.000,00	73,33
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>4.571.307.331</b>	<b>4.108.095.340,00</b>	<b>89,87</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>72.914.500.580</b>	<b>60.400.991.859,00</b>	<b>82,84</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-72.914.500.580</b>	<b>(60.400.991.859,00)</b>	<b>82,84</b>

*Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024*

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	2024%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>102.384.112.913</b>	<b>74.943.893.415</b>	<b>73,2</b>	<b>60.400.991.859</b>
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>94.422.958.076</b>	<b>68.046.273.783</b>	<b>72,07</b>	<b>56.292.896.519</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	34.327.078.464	30.654.036.647	89,3	30.299.403.264
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	60.095.879.612	37.392.237.136	62,22	25.993.493.255
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>94.422.958.076</b>	<b>68.046.273.783</b>	<b>72,07</b>	<b>56.292.896.519</b>
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.961.154.837</b>	<b>6.897.619.632</b>	<b>86,64</b>	<b>4.108.095.340</b>
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.751.236.077	6.897.619.632	88,99	4.059.255.340
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.716.120	0	0	48.840.000
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.202.640	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>7.961.154.837</b>	<b>6.897.619.632</b>	<b>86,64</b>	<b>4.108.095.340</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>102.384.112.913</b>	<b>74.943.893.415</b>	<b>73,2</b>	<b>60.400.991.859</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-102.384.112.913</b>	<b>-74.943.893.415</b>	<b>73,2</b>	<b>-60.400.991.859</b>

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat realisasi belanja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 dan 2024 belum mencapai target. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan masih belum optimal, yang menunjukkan kurangnya kesiapan atau kematangan dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa target penyerapan anggaran belum dapat direalisasikan secara maksimal. Menurut Iqbal (2018), kualitas perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Semakin baik dan matang suatu perencanaan dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, pencapaian target penyerapan anggaran sangat bergantung pada kompetensi dan ketepatan pengelola dalam menyusun serta mengimplementasikan rencana anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan peristiwa di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN

# TERHADAP REALISASI BELANJA APBD DPRD KABUPATEN BOJONEGORO”

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah dalam studi kasus ini adalah bagaimana pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap realisasi belanja APBD DPRD Kabupaten Bojonegoro?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara empiris bagaimana pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap realisasi belanja APBD DPRD Kabupaten Bojonegoro.
2. Memberikan evaluasi dan saran untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diberikan kepada stakeholder terkait dalam proses perencanaan anggaran pada Kabupaten Bojonegoro.

Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekaligus perencanaan kegiatan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
2. Literatur tambahan tentang bagaimana kualitas perencanaan anggaran berpengaruh terhadap realisasi belanja APBD.

3. Memberi pengetahuan untuk penulis tentang bagaimana peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

### **1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus bagaimana bagaimana pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap realisasi belanja APBD DPRD Kabupaten Bojonegoro, dan data yang didapatkan berasal dari pelaksana anggaran yang bertanggung jawab akan tugas yang diberikan.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah salah satu teori utama dalam bidang manajemen dan akuntansi yang membahas hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam sebuah organisasi, yaitu agen (pihak yang menjalankan tugas) dan prinsipal (pihak yang memberikan tugas). Teori ini berfokus pada bagaimana kontrak kerja antara agen dan prinsipal dapat dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin timbul akibat perbedaan tujuan, informasi, atau risiko yang dihadapi oleh kedua pihak.

Jensen dan Meckling (1976), sebagai penggagas utama teori ini, mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu pihak, yaitu prinsipal, memberikan kewenangan kepada pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan tugas atas nama prinsipal. Dalam hubungan ini, sering kali terjadi agency problem, yakni situasi di mana agen bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan prinsipal karena adanya perbedaan informasi (information asymmetry) atau konflik kepentingan (conflict of interest).

Selain itu, Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa teori keagenan bertumpu pada tiga asumsi utama. Yang pertama adalah asumsi sifat manusia, yang menganggap

bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak suka mengambil risiko. Yang kedua adalah asumsi organisasi, yang mengacu pada adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Yang ketiga adalah asumsi informasi, yang menyebutkan bahwa informasi tidak selalu merata atau sempurna di antara kedua pihak.

Teori keagenan (agency theory) relevan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemerintah pusat atau masyarakat) dan agen (pengelola anggaran di Sekretariat DPRD). Prinsipal mengharapkan agen untuk mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan transparan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat penyerapan anggaran.

Perencanaan anggaran yang baik menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Halim (2014) menyebutkan bahwa perencanaan anggaran yang matang mampu meminimalkan potensi penyimpangan, seperti alokasi dana yang tidak relevan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal. Dalam perspektif teori keagenan, perencanaan anggaran yang efektif menciptakan mekanisme kontrak yang jelas antara prinsipal dan agen, sehingga meminimalkan masalah seperti moral hazard atau perilaku oportunistik oleh agen.

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang rendah sering kali disebabkan oleh kelemahan dalam perencanaan, seperti estimasi kebutuhan yang

tidak akurat, kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan, atau keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Di Sekretariat DPRD, misalnya, perencanaan anggaran yang tidak komprehensif dapat menghambat pelaksanaan program-program pendukung fungsi DPRD, seperti kegiatan kunjungan kerja, rapat-rapat legislatif, atau penyusunan kebijakan.

### **2.1.2 Anggaran**

Anggaran merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah. Tahun anggaran berlangsung selama satu tahun penuh, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Fungsi utama anggaran adalah sebagai alat bagi pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai kewajiban, janji, dan kebijakan ke dalam rencana konkret dan terintegrasi. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang akan diambil, hasil yang diharapkan, biaya yang diperlukan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter, untuk periode waktu tertentu. Anggaran berperan sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian dengan tujuan mengarahkan pengelolaan sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien demi mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja suatu entitas.

Sementara itu, Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa anggaran adalah instrumen penting dalam manajemen keuangan yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat perencanaan, anggaran menetapkan arah, prioritas, dan strategi pemanfaatan sumber daya keuangan agar tujuan organisasi atau pemerintahan dapat tercapai dengan baik. Sebagai alat pengendalian, anggaran berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun.

### **2.1.3 Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran adalah proses realisasi atau penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam anggaran, baik oleh pemerintah maupun organisasi, untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penyerapan anggaran yang baik mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk melaksanakan program secara efisien dan efektif, sesuai dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2010), penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan keuangan yang mencerminkan sejauh mana pemerintah atau organisasi mampu merealisasikan belanja sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, Halim (2014) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja, karena rendahnya tingkat penyerapan dapat mengindikasikan adanya hambatan seperti

perencanaan yang kurang matang, keterlambatan administrasi, atau kendala teknis lainnya.

Penyerapan anggaran yang optimal penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya penyerapan anggaran dapat menghambat pencapaian target pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, dan menimbulkan risiko akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai tujuan.

#### **2.1.4 Perencanaan Anggaran**

Penyerapan dalam arti tradisional dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini maupun yang telah terjadi sebelumnya. Sementara itu, perencanaan (planning) merujuk pada suatu proses yang diawali dengan penetapan sasaran organisasi, diikuti dengan penentuan strategi guna mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh, serta penyusunan sistem perencanaan yang terintegrasi untuk menyelaraskan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas organisasi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Bastian, 2010:165).

Perencanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Berdasarkan prosesnya: perencanaan dipandang sebagai proses utama dalam pemilihan tujuan dan metode pencapaiannya.
2. Berdasarkan fungsi manajerial: perencanaan berperan ketika pimpinan memanfaatkan kewenangan atau pengaruh untuk menetapkan atau mengubah arah dan aktivitas organisasi.
3. Berdasarkan pengambilan keputusan: perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan jangka panjang yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana cara melakukannya, kapan waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya. Keputusan-keputusan tersebut belum tentu sejalan dengan tujuan sebelumnya, sehingga efektivitasnya baru akan terlihat saat implementasi dilakukan di kemudian hari.

Mengacu pada pendapat Conyers dan Hills dalam Kuncoro (2013), perencanaan dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan mencakup serangkaian keputusan atau pilihan terhadap berbagai alternatif penggunaan sumber daya, yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu di masa depan. Dari definisi ini, terdapat empat elemen utama dalam perencanaan:

1. Merupakan proses pemilihan: artinya, dalam tahap perencanaan dilakukan pemilihan terhadap sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.
2. Sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya: dalam hal ini, perencanaan digunakan untuk mengatur distribusi sumber daya yang

dibutuhkan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perencanaan juga mencakup penentuan prioritas pembangunan, baik dalam hal sektor (fokus) maupun wilayah (lokus). Fokus mengacu pada sektor pembangunan yang diutamakan, sedangkan lokus berkaitan dengan wilayah geografis seperti kabupaten, kota, atau kawasan tertentu.

3. Sebagai sarana pencapaian tujuan: tujuan tersebut tercermin dalam target dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
4. Bersifat futuristik: artinya, perencanaan dibuat dengan orientasi ke depan, guna mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Ferdinan, Isnuhadi, Widiyanti, Adam (2020)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan	Perencanaan anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Komitmen Organisasi	Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Variabel perencanaan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

		<p>Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia</p>		<p>Variabel pelaksanaan anggaran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.</p> <p>Variabel komitmen organisasi tidak terbukti mampu memperkuat atau memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran.</p> <p>Variabel komitmen organisasi juga tidak memoderasi hubungan antara pelaksanaan anggaran dengan penyerapan anggaran.</p>
2	Ramdhani, Anisa (2017)	<p>Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi</p>	<p>Perencanaan Anggaran, Kualitas sumber daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Perencanaan anggaran terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.</p> <p>Kualitas sumber daya manusia memiliki dampak positif dan signifikan terhadap efektivitas penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten.</p> <p>Pelaksanaan anggaran menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan</p>

		Perangkat Daerah Provinsi Banten		terhadap penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
3	Iqbal, Rachman, Rodi'ah (2021)	Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Rencana Anggaran, Realisasi APBD, Kinerja Keuangan Pemda	Perencanaan anggaran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika perencanaan anggaran mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan pelaksanaan yang optimal, maka kinerja keuangan cenderung mengalami penurunan. Di sisi lain, realisasi APBD secara parsial juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Peningkatan kinerja keuangan terjadi seiring dengan naiknya realisasi pendapatan, meskipun tingkat efektivitasnya tetap bergantung pada seberapa besar kesesuaian antara target yang ditetapkan dan pendapatan yang terrealisasi.

				Secara simultan, baik perencanaan anggaran maupun realisasi APBD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan, khususnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4	Puluala (2021)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada	Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa,	Perencanaan anggaran terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Salatiga. Sebaliknya, pelaksanaan anggaran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran daerah pada instansi tersebut. Kualitas sumber daya manusia berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penyerapan anggaran daerah, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa tidak

		Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)	Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah	memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Salatiga.
5	Wahyuni, Asmeri, Ardiany (2022)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Satker Kementerian Perindustrian di Kota Padang	Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Penyerapan Anggaran	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Kementerian Perindustrian di Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,005, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan derajat kebebasan (df) sebesar 32 (35 – 2 – 1), diperoleh t tabel sebesar 1,694. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,041 &gt; 1,694), maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut signifikan.</p> <p>Selanjutnya, variabel kualitas sumber daya manusia juga terbukti berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada</p>

				<p>instansi yang sama. Hal ini terlihat dari t hitung yang bernilai 4,131 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dengan <math>df = 32</math> dan t tabel sebesar 1,694, maka karena <math>t \text{ hitung} &gt; t \text{ tabel}</math> (<math>4,131 &gt; 1,694</math>), pengaruhnya dapat dinyatakan signifikan.</p> <p>Selain itu, secara simultan, variabel perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia bersama-sama memberikan pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Ini dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar 45,063 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan <math>df_1 = 2</math> (<math>3 - 1</math>) dan <math>df_2 = 32</math> (<math>35 - 3</math>), diperoleh F tabel sebesar 3,29. Karena F hitung lebih besar dari F tabel (<math>45,063 &gt; 3,29</math>), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.</p>
--	--	--	--	--

### 2.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, model kerangka penelitian menggunakan Perencanaan Anggaran sebagai variabel independen. Sementara itu, Penyerapan Anggaran adalah sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen.

*Gambar 2.1 Kerangka Konseptual*



### 2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Perencanaan anggaran yang kuat perlu dilaksanakan agar anggaran dapat berjalan lancar (Ramdhani & Anisa, 2017). Perencanaan yang dijadikan sebagai dasar dalam proses penganggaran pada dasarnya merupakan suatu tahapan penyusunan rencana mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. Proses ini mencakup aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat, ketepatan data, pengesahan APBD, pendekatan serta instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan kebutuhan, hingga kemungkinan revisi atau perubahan. Tanpa adanya konsep perencanaan anggaran yang konkret dan realistis, pelaksanaan penggunaan dana akan sulit diarahkan secara efektif dan sesuai sasaran.

Meskipun rendahnya tingkat penyerapan anggaran bukan satu-satunya tolok ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, perhatian tetap perlu

diberikan terhadap hal ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka target kinerja yang telah direncanakan berpotensi tidak tercapai. Akibatnya, sejumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak termanfaatkan secara optimal, padahal dana tersebut bisa saja dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang tersusun dengan baik dapat mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran, dan jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap tingkat serapan anggaran.. Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan metode berlandaskan paradigma positivistik. Pendekatan ini mengandalkan pengumpulan data secara acak dengan menggunakan instrumen yang telah distandarisasi, kemudian dianalisis melalui teknik statistik (Sugiyono, 2018). Data yang diperoleh berupa angka-angka yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode statistik, baik secara deskriptif maupun inferensial, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya (Silaen, 2018).

#### **3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2017), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti sebagai fokus kajian untuk diteliti dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2024, yang berjumlah sebanyak 50 orang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik sensus, sehingga seluruh anggota DPRD tersebut dijadikan responden dalam penelitian ini. Selain itu, data sekunder yang dianalisis mencakup laporan realisasi anggaran DPRD Kabupaten

Bojonegoro untuk tahun anggaran 2023 dan 2024, yang turut dijadikan sebagai sampel tambahan

### **3.3 SUMBER DAN JENIS DATA**

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disusun oleh peneliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli oleh peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2023 dan 2024, yang telah tersedia dan diolah oleh penulis.

### **3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kuesioner. Menurut Sugiyono (2017), kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab secara mandiri. Instrumen kuesioner disebarkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaannya, digunakan skala Likert sebagai alat ukur untuk mengetahui persepsi dan sikap responden terhadap variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian dengan pertanyaan yang menggunakan Skala Likert, dimulai dengan Sangat Setuju dengan skor 5, Setuju

dengan skor 4, Kurang Setuju dengan skor 3, Tidak Setuju dengan Skor 2, Sangat Tidak Setuju dengan Skor 1. Kuesioner yang telah disusun dan didapatkan hasilnya kemudian dilakukan pengujian kelayakannya melalui pengujian validaitas dan reliabilitas.

### **3.5 DEFINISI VARIABEL INDIKATOR**

Variabel indikator merupakan rincian operasional yang menjelaskan bagaimana suatu variabel ditentukan, diukur, dan diklasifikasikan dalam konteks penelitian. Menurut Sugiyono (2017), definisi operasional adalah penjelasan rinci mengenai suatu konstruk atau variabel dalam bentuk indikator-indikator yang dapat diukur secara objektif dan konsisten. Variabel dalam penelitian ini antara lain:

1. Perencanaan Anggaran (X)

Robbins dan Coulter (2016) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran merupakan bagian integral dari proses manajerial yang lebih luas, yang bertujuan untuk menentukan strategi alokasi sumber daya keuangan guna mencapai tujuan organisasi. Anggaran dipandang sebagai instrumen penting dalam mengendalikan pengeluaran, memantau kinerja keuangan, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang.

2. Penyerapan Anggaran (Y)

Menurut Mahmudi (2010), penyerapan anggaran mencerminkan indikator kinerja dalam manajemen keuangan publik, yang mengukur sejauh mana belanja anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Halim (2014) menambahkan bahwa penyerapan anggaran sangat berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja, di mana rendahnya tingkat penyerapan menunjukkan potensi kendala seperti kelemahan dalam perencanaan atau hambatan implementasi program.

### **3.6 TEKNIK ANALISIS DATA**

#### **3.6.1 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum menjalankan analisis regresi linear, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria estimasi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilaksanakan mencakup uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Apabila hasil uji menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Sementara itu, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual pada setiap tingkat nilai prediktor. Pengujian dilakukan menggunakan metode Glejser Test atau Scatterplot. Jika hasil pengujian tidak menunjukkan pola yang jelas atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

### 3.6.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian kuantitatif ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Rumus analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel bebas (independen)  $X$  dan satu variabel terikat (dependen)  $Y$ .

$$Y = a + bX + e$$

Penjelasan Komponen Rumus:

- $Y$  : Variabel terikat (dependen), yaitu variabel yang nilainya diprediksi.
- $X$  : Variabel bebas (independen), yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi  $Y$
- $a$  : Konstanta (intersep), nilai  $Y$  ketika  $X = 0$
- $b$  : Koefisien regresi (slope), menunjukkan perubahan  $Y$  untuk setiap perubahan satu unit pada  $X$
- $e$  : Error (galat), yaitu variabel gangguan yang mencakup faktor-faktor lain yang memengaruhi  $Y$  tetapi tidak dimasukkan dalam model.

### 3.6.3 Uji Validitas

Uji validitas secara statistik digunakan untuk menilai apakah instrumen atau item dalam kuesioner mampu mengukur konsep yang ingin diukur dengan akurat. Uji

ini mengevaluasi hubungan antara item dalam instrumen dengan total skor atau kriteria lain yang relevan.

$$r = \frac{n \sum(XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Penjelasan Komponen Rumus:

- $r$  : Koefisien korelasi.
- $X$  : Skor untuk setiap item.
- $Y$  : Skor total instrumen.
- $n$  : Jumlah responden

Sebuah butir dalam instrumen dinilai valid atau tidak dengan melihat nilai probabilitas dari koefisien korelasinya. Menurut Sugiyono (2016), pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  yang diperoleh dari perhitungan ( $r$  hitung) dengan nilai  $r$  pada tabel ( $r$  tabel). Jika nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel dan bernilai positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Namun, jika nilai  $r$  hitung sama dengan atau kurang dari nilai  $r$  tabel, maka butir tersebut dianggap tidak valid.

### 3.6.3.1 Uji Validitas Butir Variabel Independen X (Perencanaan Anggaran)

**Correlations**

		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	TOTAL
X01	Pearson Correlation	1	,434**	,279*	,260	,653**	,092	,382**	,399**	,440**	,542**	,451**	,474**	,292*	,701**
	Sig. (2-tailed)		,002	,049	,069	<.001	,525	,006	,004	,001	<.001	<.001	<.001	,040	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X02	Pearson Correlation	,434**	1	,343*	,209	,278	,300*	,319*	,327*	,329*	,545**	,402**	,359*	,181	,620**
	Sig. (2-tailed)	,002		,015	,145	,050	,034	,024	,020	,020	<.001	,004	,010	,209	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X03	Pearson Correlation	,279*	,343*	1	,387**	,314*	,107	,458**	,192	,158	,485**	,257	,266	,196	,558**
	Sig. (2-tailed)	,049	,015		,005	,026	,460	<.001	,183	,272	<.001	,071	,062	,173	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X04	Pearson Correlation	,260	,209	,387**	1	,445**	,107	,343*	,134	,261	,278	,367**	,222	,163	,539**
	Sig. (2-tailed)	,069	,145	,005		,001	,461	,015	,354	,067	,050	,009	,121	,259	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X05	Pearson Correlation	,653**	,278	,314*	,445**	1	,205	,504**	,432**	,258	,495**	,597**	,398**	,349*	,737**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,050	,026	,001		,153	<.001	,002	,070	<.001	<.001	,004	,013	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X06	Pearson Correlation	,092	,300*	,107	,107	,205	1	,313*	,218	,203	,300*	,370**	,140	,365**	,473**
	Sig. (2-tailed)	,525	,034	,460	,461	,153		,027	,129	,157	,035	,008	,332	,009	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X07	Pearson Correlation	,382**	,319*	,458**	,343*	,504**	,313*	1	,290*	,100	,444**	,507**	,241	,176	,645**
	Sig. (2-tailed)	,006	,024	<.001	,015	<.001	,027		,041	,488	,001	<.001	,092	,220	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X08	Pearson Correlation	,399**	,327*	,192	,134	,432**	,218	,290*	1	,346*	,333*	,343*	,186	,348*	,557**
	Sig. (2-tailed)	,004	,020	,183	,354	,002	,129	,041		,014	,018	,015	,196	,013	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X09	Pearson Correlation	,440**	,329*	,158	,261	,258	,203	,100	,346*	1	,400**	,313*	,260	,470**	,580**
	Sig. (2-tailed)	,001	,020	,272	,067	,070	,157	,488	,014		,004	,027	,068	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X10	Pearson Correlation	,542**	,545**	,485**	,278	,495**	,300*	,444**	,333*	,400**	1	,322*	,399**	,307*	,728**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	,050	<.001	,035	,001	,018	,004		,023	,004	,030	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X11	Pearson Correlation	,451**	,402**	,257	,367**	,597**	,370**	,507**	,343*	,313*	,322*	1	,401**	,421**	,720**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,004	,071	,009	<.001	,008	<.001	,015	,027	,023		,004	,002	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X12	Pearson Correlation	,474**	,359*	,266	,222	,398**	,140	,241	,186	,260	,399**	,401**	1	,239	,563**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,010	,062	,121	,004	,332	,092	,196	,068	,004	,004		,095	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X13	Pearson Correlation	,292*	,181	,196	,163	,349*	,365**	,176	,348*	,470**	,307*	,421**	,239	1	,561**
	Sig. (2-tailed)	,040	,209	,173	,259	,013	,009	,220	,013	<.001	,030	,002	,095		<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	,701**	,620**	,558**	,539**	,737**	,473**	,645**	,557**	,580**	,728**	,720**	,563**	,561**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item Pernyataan		Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Perencanaan Anggaran	X01	,701**	<0,001	Valid
	X02	,620**	<0,001	Valid
	X03	,558**	<0,001	Valid
	X04	,539**	<0,001	Valid
	X05	,737**	<0,001	Valid
	X06	,473**	<0,001	Valid
	X07	,645**	<0,001	Valid
	X08	,557**	<0,001	Valid
	X09	,580**	<0,001	Valid
	X10	,728**	<0,001	Valid
	X11	,720**	<0,001	Valid

	X12	,563**	<0,001	Valid
	X13	,561**	<0,001	Valid

### 3.6.3.2 Uji Validitas Butir Variabel Dependen Y (Penyerapan Anggaran)

		Correlations													
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	TOTAL
Y01	Pearson Correlation	1	,392**	,825**	,456**	,831**	,873**	,531**	,298*	,868**	,731**	,862**	,830**	,537**	,887**
	Sig. (2-tailed)		,005	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	,036	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y02	Pearson Correlation	,392**	1	,333*	,053	,296*	,417**	,125	,318*	,353*	,307*	,374**	,309*	,256	,491**
	Sig. (2-tailed)	,005		,018	,715	,037	,003	,386	,025	,012	,030	,008	,029	,073	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y03	Pearson Correlation	,825**	,333*	1	,435**	,824**	,854**	,457**	,235	,842**	,816**	,907**	,866**	,431**	,839**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,018		,002	<.001	<.001	<.001	,101	<.001	<.001	<.001	<.001	,002	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y04	Pearson Correlation	,456**	,053	,435**	1	,506**	,467**	,387**	,297*	,443**	,462**	,414**	,314*	,628**	
	Sig. (2-tailed)	<.001	,715	,002		<.001	<.001	,005	,037	,001	<.001	,003	,027	<.001	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Y05	Pearson Correlation	,831**	,296*	,824**	,506**	1	,824**	,519**	,276	,814**	,740**	,866**	,833**	,517**	,865**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,037	<.001	<.001		<.001	<.001	,052	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y06	Pearson Correlation	,873**	,417**	,854**	,467**	,824**	1	,423**	,251	,941**	,850**	,944**	,910**	,484**	,884**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,003	<.001	<.001	<.001		,002	,078	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y07	Pearson Correlation	,531**	,125	,457**	,387**	,519**	,423**	1	-,015	,475**	,396**	,476**	,454**	,327*	,605**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,386	<.001	,005	<.001	,002		,916	<.001	,004	<.001	<.001	,020	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y08	Pearson Correlation	,298*	,318*	,235	,297*	,276	,251	-,015	1	,236	,358*	,166	,246	,378**	,472**
	Sig. (2-tailed)	,036	,025	,101	,037	,052	,078	,916		,098	,011	,250	,084	,007	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y09	Pearson Correlation	,868**	,353*	,842**	,443**	,814**	,941**	,475**	,236	1	,834**	,941**	,968**	,459**	,873**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,012	<.001	,001	<.001	<.001	<.001	,098		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y10	Pearson Correlation	,731**	,307*	,816**	,462**	,740**	,850**	,396**	,358*	,834**	1	,787**	,865**	,439**	,824**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,030	<.001	<.001	<.001	<.001	,004	,011	<.001		<.001	<.001	,001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y11	Pearson Correlation	,862**	,374**	,907**	,462**	,866**	,944**	,476**	,166	,941**	,787**	1	,906**	,457**	,869**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,008	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	,250	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y12	Pearson Correlation	,830**	,309*	,866**	,414**	,833**	,910**	,454**	,246	,968**	,865**	,906**	1	,431**	,850**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,029	<.001	,003	<.001	<.001	<.001	,084	<.001	<.001	<.001		,002	<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Y13	Pearson Correlation	,537**	,256	,431**	,314*	,517**	,484**	,327*	,378**	,459**	,439**	,457**	,431**	1	,666**
	Sig. (2-tailed)	<.001	,073	,002	,027	<.001	<.001	,020	,007	<.001	,001	<.001	,002		<.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	,887**	,491**	,839**	,628**	,865**	,884**	,605**	,472**	,873**	,824**	,869**	,850**	,666**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Item Pernyataan		Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Penyerapan Anggaran	Y01	,887**	<0,001	Valid
	Y02	,491**	<0,001	Valid
	Y03	,839**	<0,001	Valid
	Y04	,628**	<0,001	Valid
	Y05	,865**	<0,001	Valid
	Y06	,884**	<0,001	Valid
	Y07	,605**	<0,001	Valid
	Y08	,472**	<0,001	Valid
	Y09	,873**	<0,001	Valid
	Y10	,824**	<0,001	Valid
	Y11	,869**	<0,001	Valid
	Y12	,850**	<0,001	Valid
	Y13	,666**	<0,001	Valid

### 3.6.4 Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha adalah salah satu metode statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian, seperti kuesioner. Konsistensi internal menunjukkan sejauh mana item-item dalam instrumen saling berkaitan atau seberapa baik mereka mengukur konsep yang sama.

$$\alpha = \frac{N}{N - 1} \left( 1 - \frac{\sum \sigma_{item}^2}{\sigma_{total}^2} \right)$$

Penjelasan Komponen Rumus:

- $\alpha$  : Nilai Cronbach's Alpha.
- $N$  : Jumlah item dalam instrumen.

- $\sum \sigma_{item}^2$  : varians setiap item
- $\sigma_{total}^2$  : varians total skor (jumlah skor dari semua item)

Cronbach's Alpha menghitung rata-rata korelasi antar item dalam instrumen.

Jika semua item berkorelasi sempurna satu sama lain, maka nilai  $\alpha = 1$ , yang menunjukkan reliabilitas sempurna.

### 3.6.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis merupakan tahap penting untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah analisis regresi, yang dilengkapi dengan uji statistik, yaitu uji t (parsial) dan uji F (simultan). Kedua uji ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, baik untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

#### 3.6.5.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan kata lain, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas secara individual memberikan kontribusi yang signifikan dalam model regresi yang dibangun. Hipotesis yang digunakan dalam uji t dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a.  $H_0: \beta = 0$ , yang berarti bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b.  $H_1: \beta \neq 0$ , yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi (p-value) sama dengan atau lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Uji t sangat berguna dalam menilai sejauh mana masing-masing variabel bebas memberikan kontribusi dalam memprediksi variabel terikat. Dalam penelitian, hasil dari uji ini memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan strategis dengan mengidentifikasi variabel yang paling dominan.

#### **3.6.5.2 Uji F (Uji Simultan)**

Berbeda dengan uji t, uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Uji ini menjawab pertanyaan: apakah model regresi yang dibangun secara

keseluruhan layak dan signifikan dalam menjelaskan variabel terikat? Rumusan hipotesis untuk uji F adalah:

- a.  $H_0$ : Seluruh koefisien regresi = 0 (model tidak signifikan)
- b.  $H_1$ : Minimal ada satu koefisien regresi  $\neq 0$  (model signifikan)

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai Sig. (p-value)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan.
- b. Jika nilai Sig. (p-value)  $\geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti model regresi tidak signifikan secara simultan.

Uji F penting dalam menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Meskipun ada variabel independen yang tidak signifikan secara parsial, bisa jadi model tersebut tetap signifikan secara simultan.

### 3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi atau R-Square ( $R^2$ ) merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan dalam regresi linier untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL PENELITIAN

Jawaban Responden Variabel Perencanaan Anggaran (X)

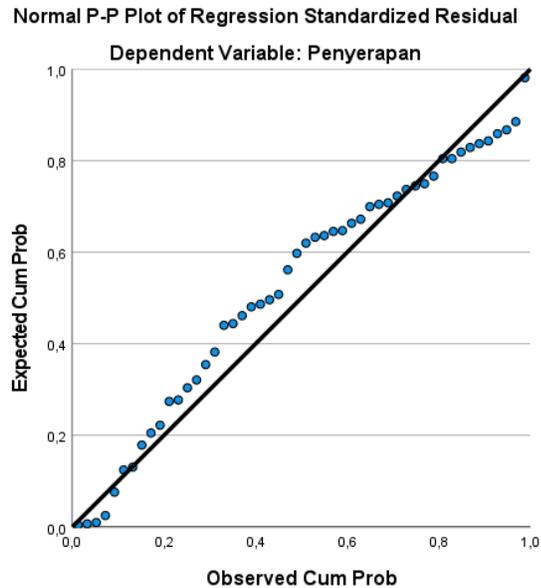
No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Saya memahami proses perencanaan anggaran daerah (RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, RAPBD, APBD).	2	15	23	9	1
2	Saya memperoleh pemahaman perencanaan anggaran melalui pelatihan/workshop yang relevan.	2	15	22	9	2
3	Dokumen atau regulasi anggaran yang ada mudah saya pahami.	5	13	22	8	2
4	Saya dilibatkan dalam Musrenbang di berbagai tingkatan (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota).	7	11	17	13	2
5	Saya aktif berperan dalam pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD.	4	7	18	20	1
6	DPRD memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah alokasi anggaran.	5	5	23	13	4
7	Aspirasi masyarakat yang saya serap melalui reses sudah tercermin dalam dokumen perencanaan anggaran.	6	10	17	13	4
8	Koordinasi antara DPRD dan Bappeda/SKPD dalam proses perencanaan berjalan dengan baik.	1	17	19	12	1
9	DPRD dilibatkan secara substansial dalam penentuan prioritas pembangunan dan anggaran.	8	15	14	8	5
10	Saya secara rutin melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran setiap triwulan atau semester.	2	8	18	19	3
11	DPRD memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi efektivitas program dan serapan anggaran.	2	13	23	8	4
12	Indikator kinerja program (IKU/IKD) dalam dokumen perencanaan sudah cukup memadai.	1	8	24	12	5
13	Saya memiliki akses yang memadai terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran (SIPD).	2	16	21	9	2

### Jawaban Responden Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Saya memahami konsep penyerapan anggaran baik dari aspek fisik maupun keuangan.	18	28	4	0	0
2	DPRD menerima laporan penyerapan anggaran dari pemerintah daerah secara berkala dan lengkap.	21	14	8	4	3
3	Informasi dari laporan realisasi APBD cukup untuk menilai kinerja penyerapan anggaran.	15	32	3	0	0
4	Media massa sering menjadi sumber informasi saya tentang serapan anggaran.	21	15	3	6	5
5	Penyerapan anggaran oleh Pemda dalam setahun terakhir sudah optimal.	19	28	3	0	0
6	Sektor infrastruktur memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah.	14	31	5	0	0
7	Salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah lemahnya perencanaan.	20	9	8	8	5
8	Proses birokrasi di SKPD menjadi kendala utama dalam percepatan realisasi anggaran.	24	12	9	2	3
9	Kurangnya kapasitas SDM di SKPD berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran.	13	33	4	0	0
10	DPRD memiliki peran aktif dalam mengawasi penyerapan anggaran sepanjang tahun berjalan.	10	36	4	0	0
11	Komisi saya secara rutin mengadakan rapat kerja dengan SKPD untuk membahas realisasi anggaran.	15	31	4	0	0
12	DPRD memiliki akses yang cukup terhadap data penyerapan anggaran secara real-time.	13	34	3	0	0
13	Rekomendasi dari DPRD sering ditindaklanjuti oleh eksekutif dalam proses evaluasi anggaran.	18	14	9	4	5

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

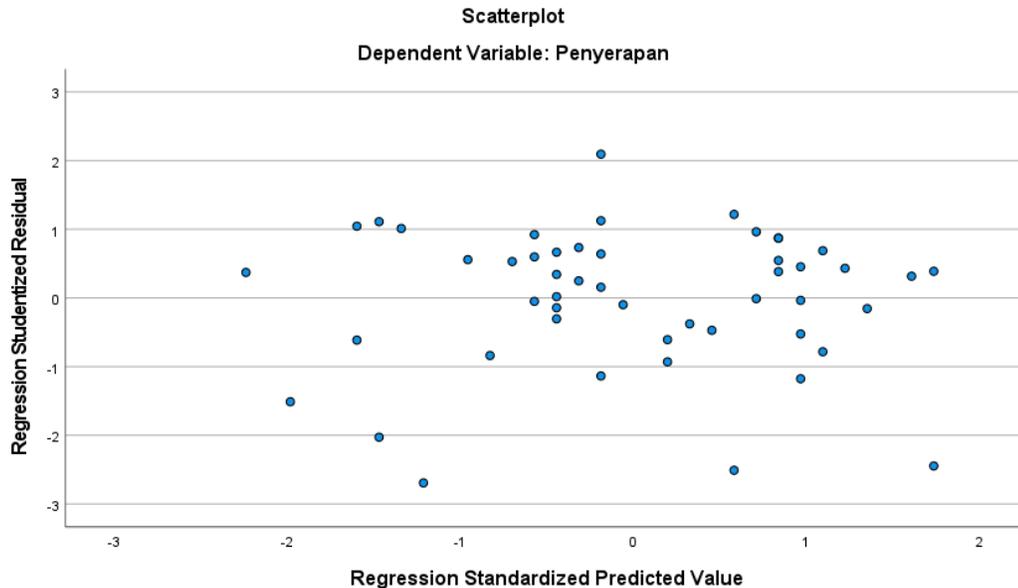
#### 4.1.2.1 Uji Normalitas



Sebagian besar titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, menunjukkan bahwa residual dari model regresi mendekati distribusi normal. Tidak terdapat pola melengkung atau deviasi ekstrem dari garis diagonal, baik di bagian awal, tengah, maupun akhir distribusi. Beberapa titik memang sedikit menyimpang, namun masih dalam batas wajar untuk data empiris.

Berdasarkan grafik P-P Plot, distribusi residual bersifat normal atau hampir normal, yang memenuhi salah satu syarat utama dalam analisis regresi linier klasik. Ini memperkuat validitas hasil uji regresi yang sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka kesimpulan dari model regresi dapat dianggap reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

#### 4.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas



Titik-titik tersebar secara acak dan merata di sekitar garis nol horizontal, tanpa membentuk pola tertentu. Tidak ditemukan pola mengembang (funnel), menyempit, atau berbentuk lengkung, yang merupakan indikasi umum adanya heteroskedastisitas. Penyebaran residual juga terlihat konstan di sepanjang nilai prediksi, baik untuk nilai negatif maupun positif.

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut, tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, artinya varians residual konstan di semua level prediksi. Hal ini mendukung keandalan model regresi dalam melakukan estimasi dan interpretasi, serta memastikan bahwa hasil uji t dan uji F tidak bias akibat gangguan varians residual.

#### 4.1.2.3 Uji Regresi Linier Sederhana

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance			VIF	
1	(Constant)	30,152	4,605		6,548	<,001		
	Perencanaan	,576	,115	,587	5,025	<,001	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Penyerapan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang tercantum pada Tabel Koefisien, terlihat bahwa variabel Perencanaan secara signifikan memengaruhi variabel Penyerapan. Hal ini terlihat dari koefisien regresi (B) sebesar 0,576 dengan tingkat signifikansi (Sig.) kurang dari 0,001. Artinya, peningkatan satu unit pada indikator Perencanaan akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,576 unit pada Penyerapan—dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Karena nilai Sig. berada di bawah batas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan bersifat signifikan secara statistik.

Lebih lanjut, nilai t-hitung sebesar 5,025 jauh melampaui nilai t-tabel pada taraf 5%, semakin memperkuat kesimpulan bahwa Perencanaan berdampak nyata pada Penyerapan. Dukungan lain datang dari nilai Standardized Coefficient (Beta) yang mencapai 0,587, menandakan bahwa Perencanaan memiliki kekuatan pengaruh yang cukup besar dalam menjelaskan variasi Penyerapan. Karena Beta positif, hubungan antara Perencanaan dan Penyerapan juga bersifat positif—artinya semakin baik kualitas perencanaan, semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran yang dicapai.

Dari hasil perhitungan juga diperoleh nilai konstanta (intercept) sebesar 30,152. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada aktivitas perencanaan sama sekali (nilai Perencanaan = 0), maka nilai Penyerapan diperkirakan berada pada angka 30,152. Dengan demikian, persamaan regresi linier sederhana yang terbentuk dari hasil analisis tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y=30,152+0,576X$$

Di mana:

$Y$  = Penyerapan

$X$  = Perencanaan

Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah multikolinieritas, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan tabel, nilai Tolerance adalah 1,000 dan nilai VIF juga sebesar 1,000. Kedua nilai ini berada dalam batas normal (Tolerance > 0,1 dan VIF < 10), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model, dan variabel Perencanaan tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel independen lain (meskipun pada model ini hanya terdapat satu variabel bebas).

### **4.1.3 Uji Hipotesis**

#### **4.1.3.1 Uji t (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30,152	4,605		6,548	<,001		
	Perencanaan	,576	,115	,587	5,025	<,001	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Penyerapan

Pada output Tabel Koefisien, nilai t-hitung untuk variabel Perencanaan tercatat sebesar 5,025 dengan Sig. < 0,001. Karena Sig. jauh lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Dengan demikian, secara parsial, Perencanaan anggaran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Penyerapan anggaran.

Koefisien regresi (B) untuk Perencanaan sebesar 0,576 menunjukkan bahwa setiap tambahan satu unit pada Perencanaan akan menaikkan Penyerapan sebesar 0,576 unit, dengan asumsi variabel lain tetap. Adapun nilai Beta (koefisien terstandarisasi) sebesar 0,587 mengindikasikan bahwa pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan, dalam skala standar, dapat dikatakan cukup kuat.

#### 4.1.3.2 Uji F (Simultan)

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	988,614	1	988,614	25,249	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	1879,406	48	39,154		
	Total	2868,020	49			

a. Dependent Variable: Penyerapan

b. Predictors: (Constant), Perencanaan

Berdasarkan Tabel ANOVA, diperoleh F-hitung sebesar 25,249 dengan tingkat signifikansi (Sig.) di bawah 0,001. Karena Sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bersama-sama variabel Perencanaan secara kolektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan.

Selain itu, nilai Sum of Squares untuk regresi tercatat 988,614, sementara Sum of Squares residual sebesar 1.879,406, sedangkan totalnya mencapai 2.868,020. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan porsi yang substansial dari variasi pada variabel dependen.

#### 4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 <sup>a</sup>	,345	,331	6,25734

a. Predictors: (Constant), Perencanaan

b. Dependent Variable: Penyerapan

Pada Tabel Model Summary, nilai korelasi (R) tercatat 0,587, menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara variabel Perencanaan dan Penyerapan. Nilai R-Square ( $R^2$ ) sebesar 0,345 berarti bahwa 34,5% variasi Penyerapan dapat dijelaskan oleh Perencanaan, sedangkan sisanya (65,5%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Nilai Adjusted R-Square yang sebesar 0,331 merupakan  $R^2$  yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, sehingga memberikan perkiraan kontribusi yang lebih akurat jika diterapkan pada populasi. Sementara itu, Standard Error of the Estimate sebesar 6,25734 menunjukkan rata-rata deviasi prediksi model terhadap nilai aktual Penyerapan dalam satuan yang sama dengan variabel Penyerapan..

#### 4.2 PEMBAHASAN

Hasil uji t (parsial), diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,025 dengan  $p < 0,001$  untuk variabel Perencanaan Anggaran. Nilai ini jauh di bawah  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis nol ( $\beta = 0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $\beta \neq 0$ ) diterima. Koefisien regresi ( $B = 0,576$ ) mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin dalam skor perencanaan anggaran akan mendorong kenaikan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 0,576 poin. Hal ini berarti kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, dimana hubungan antara perencana anggaran (agen) dan pemilik kepentingan, seperti masyarakat atau lembaga

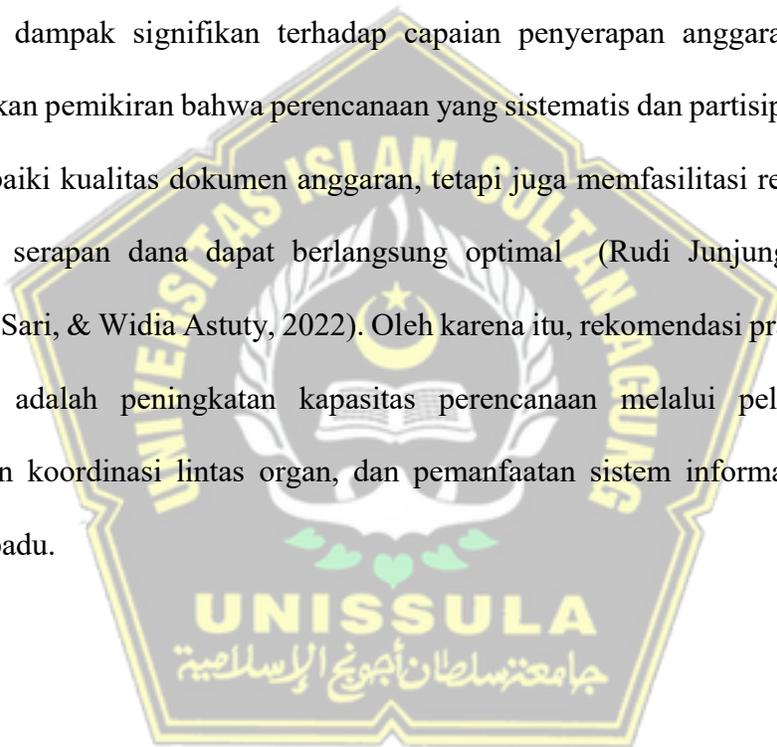
pengawas (prinsipal), menjadi relevan. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal karena perbedaan tujuan. Agen, dalam hal ini anggota DPRD atau pejabat yang menyusun dan melaksanakan anggaran, memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan prinsipal. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang berkualitas mencerminkan upaya agen dalam meminimalkan asimetri informasi dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel.

kualitas perencanaan anggaran yang baik dapat menjadi instrumen untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal. Melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif dan berbasis data, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan. Dalam teori keagenan, ini dapat dilihat sebagai mekanisme monitoring dan incentive alignment—yakni pengawasan dan penyusunan insentif yang dapat mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan berdampak pada aspek kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian terdahulu, Ksuma (2019) menyimpulkan bahwa apabila penyusunan perencanaan anggaran dilakukan secara efektif, maka penyerapan anggaran juga akan menjadi efektif. Perencanaan yang dilakukan secara cermat, realistis, dan berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat akan menghasilkan alokasi anggaran yang lebih terarah dan efisien. Dengan demikian,

proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu, yang berdampak pada meningkatnya tingkat penyerapan anggaran..

Secara keseluruhan, hasil penelitian menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas perencanaan anggaran—meliputi pemahaman regulasi, partisipasi anggota DPRD dalam musrenbang, serta ketersediaan data perencanaan yang memadai—memiliki dampak signifikan terhadap capaian penyerapan anggaran. Temuan ini menguatkan pemikiran bahwa perencanaan yang sistematis dan partisipatif tidak hanya memperbaiki kualitas dokumen anggaran, tetapi juga memfasilitasi realisasi program sehingga serapan dana dapat berlangsung optimal (Rudi Junjungan Sirait, Eka Nurmala Sari, & Widia Astuty, 2022). Oleh karena itu, rekomendasi praktis yang dapat diajukan adalah peningkatan kapasitas perencanaan melalui pelatihan berkala, penguatan koordinasi lintas organ, dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terpadu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan anggaran memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat penyerapan anggaran di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Temuan menunjukkan bahwa semakin baik proses perencanaan yang dilakukan—yang mencakup aspek-aspek seperti akurasi data, ketajaman analisis kebutuhan, dan partisipasi aktif anggota legislatif—maka semakin besar pula kemungkinan anggaran yang telah disusun dapat diserap secara efektif. Analisis juga mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran secara keseluruhan merupakan bagian integral dari proses pengelolaan keuangan daerah yang berkontribusi terhadap tercapainya target-target penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam perencanaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas koordinasi, komunikasi antarunit, dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan DPRD. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar kualitas perencanaan yang turut memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran. Faktor-faktor tersebut bisa mencakup kemampuan sumber daya manusia, kesiapan sistem informasi keuangan, serta hambatan administratif dan regulatif yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan perlu diiringi

dengan pembenahan aspek pendukung lainnya agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih optimal.

Secara konseptual, temuan ini memperkuat landasan teori manajemen anggaran publik yang menekankan bahwa perencanaan yang komprehensif dan partisipatif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan realisasi anggaran. Pada DPRD Kabupaten Bojonegoro, integrasi data partisipatif, konsistensi standar teknis, dan penguatan mekanisme umpan balik tampak krusial untuk meningkatkan efektivitas penyerapan dana publik.

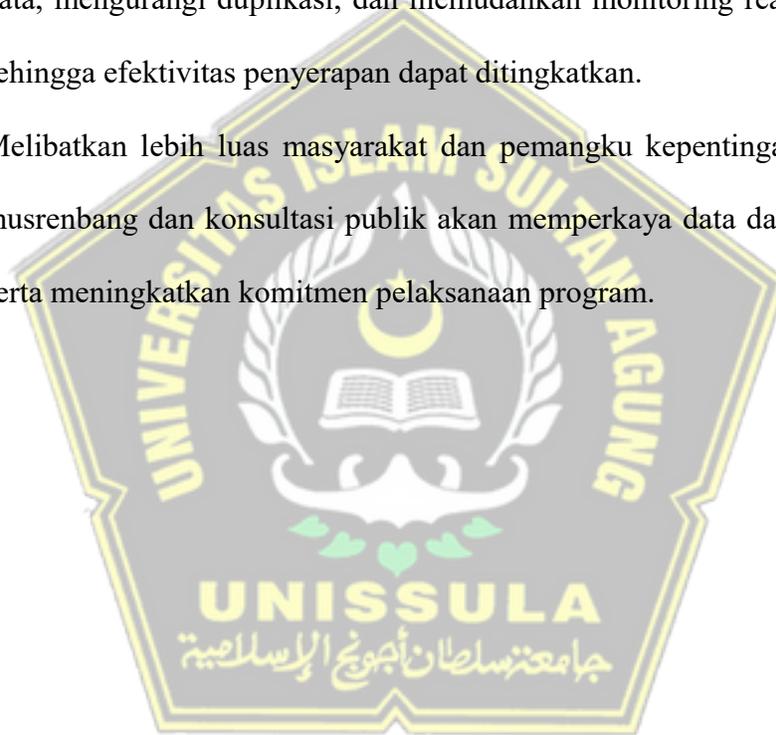
## **5.2 IMPLIKASI**

### **5.2.1 Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya**

- a. Penelitian mendatang dapat memperkaya model dengan memasukkan variabel-variabel lain seperti kapasitas sumber daya manusia, efektivitas sistem informasi anggaran, atau budaya organisasi, guna meningkatkan nilai  $R^2$  dan memperjelas sumbangan relatif setiap faktor.
- b. Dengan menggunakan desain penelitian longitudinal, perubahan hubungan antara perencanaan dan penyerapan anggaran dalam beberapa tahun dapat dipantau untuk mengidentifikasi pola dinamis dan efek jangka panjang.
- c. Kombinasi analisis kuantitatif dengan wawancara mendalam atau studi kasus akan membantu menggali proses perencanaan di lapangan serta hambatan implementasi yang tidak terungkap melalui kuesioner.

### 5.2.2 Implikasi bagi Pemerintah Daerah

- a. Disarankan untuk mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin bagi anggota DPRD dan staf sekretariat dalam penyusunan RKA dan RKPD, agar pemahaman regulasi dan metode perencanaan dapat terstandar.
- b. Pemanfaatan platform e-planning yang terintegrasi akan mempercepat alur data, mengurangi duplikasi, dan memudahkan monitoring realisasi anggaran, sehingga efektivitas penyerapan dapat ditingkatkan.
- c. Melibatkan lebih luas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam forum musrenbang dan konsultasi publik akan memperkaya data dasar perencanaan serta meningkatkan komitmen pelaksanaan program.



## DAFTAR PUSTAKA

- C. Jensen M, H. Meckling, W. (1976) Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure
- Eisenhardt, K.M. (1989) Agency Theory : An Assessment and Review
- Ferdinan, Isnuhadi, Widiyanti, Adam (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitiandan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia
- Halim, & Kusufi. (2014) Manajemen Keuangan Sektor Publik
- Iqbal, M. (2018) Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pembederasi
- Iqbal, Rachman, Rodi'ah (2021). Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- Ksuma, S. R. (2019). Pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- Kuncoro, D. (2013). "Analisis Penyerapan ANGGARAN Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Sakter Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. 1 Dinas PU Prov. Kaltim". eJournal Administrasi Bisnis.
- Mahmudi. (2010) Manajemen Kinerja Sektor Publik Mardiasmo. (2018) Akuntansi Sektor Publik

- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Puluala (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)
- Ramdhani, Dadan & Anisa, Indi Zaenur Anisa (2017) “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten”. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.10 No.1, April 2017
- Robbins & Coulter. (2016) Management. 13th Edition Robbins & Coulter. (2002) Manajement
- Rudi Junjungan Sirait, Eka Nurmala Sari, & Widia Astuty. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 8(2), 197–207.
- Silaen, S. (2018) Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Bogor: In Media
- Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Afabeta
- Wahyuni, Asmeri, Ardiany (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris Pada Satker Kementerian Perindustrian di Kota Padang